
IMPLIKASI KEBIJAKAN IMIGRASI ILEGAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP

Leonardo Daniel Tampubolon¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, A.A. Ayu Intan Parameswari³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat pada Pemerintahan Donald Trump dirangkum dalam dua perintah eksekutif, yaitu perintah eksekutif 13767 dan perintah eksekutif 13780. Perintah eksekutif ini memperketat proses masuknya imigran ke Amerika Serikat dengan tujuan memastikan keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat. Kebijakan imigrasi ilegal ini diterapkan oleh Donald Trump dengan pondasi politik luar negeri *America First*. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan imigrasi ilegal terhadap politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump melalui analisis kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri. Penelitian ini kemudian menemukan jawaban bahwa kebijakan imigrasi ilegal Amerika Serikat pada pemerintahan Donald Trump dan politik luar negeri Amerika Serikat yaitu *America First* saling memengaruhi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesepakatan baru yang dibuat untuk menyukseskan kebijakan imigrasi ilegal ini, seperti Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2396 dan keluarnya Donald Trump dari Kesepakatan Global Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang migrasi. Penelitian ini juga menunjukkan terdapat perubahan terhadap tingkat keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat semenjak kedua kebijakan imigrasi ilegal ini diimplementasikan.

Kata-kunci : *America First*, Amerika Serikat, Imigrasi Ilegal, Kepentingan Nasional, Politik Luar Negeri

Abstract

The United States Immigration Policy in Donald Trump's administration is summarized in two executive orders, namely executive order 13767 and executive order 13780. This executive order tightens the process for immigrants entering the United States with the aim of ensuring the security and welfare of the United States. This illegal immigration policy was implemented by Donald Trump by practicing America First foreign policy. This research using a qualitative method aims to reveal illegal immigration policies towards US foreign policy during the reign of Donald Trump through an analysis of national interests and foreign policy. This research then finds the answer that the United States' illegal immigration policy in Donald Trump's government and the United States' foreign policy, namely America First, influence each other. The results of the analysis show that there are several new agreements made to make this illegal immigration policy successful, such as United Nations Security Council Resolution 2396 and the Donald Trump's exit from Global Compact for Migration. This research also shows that there has been a change in the level of security and prosperity in the United States since these two illegal reform policies were implemented.

Keywords : *America First, Foreign Policy, Illegal Immigration, National Interest, United States*

Kontak Penulis

Leonardo Daniel Tampubolon

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jalan Tukad Melangit Gang XII No.5, Panjer, Denpasar Selatan, 80225

Telp: 081339932685

E-mail : leonardo09.daniel08@gmail.com

PENDAHULUAN

Amerika Serikat merupakan negara tujuan bagi banyak kelompok imigran di dunia. Terdapat lima alasan umum mengapa kelompok imigran ingin bermigrasi ke Amerika Serikat, yaitu kesempatan mencari kerja yang lebih besar; (2) standar hidup yang lebih baik; (3) untuk tinggal menetap bersama kerabat ataupun pasangan yang tinggal di Amerika Serikat; (4) untuk pergi keluar dari konflik negeri asal; dan (5) mengenyam pendidikan yang lebih baik (U.S. Immigration Law Center, Mei 2015).

Kedatangan berbagai kelompok imigran ke Amerika Serikat sudah berlangsung sejak abad ke-19. Pada saat itu kelompok imigran yang datang ke Amerika Serikat tidak begitu banyak dan Amerika Serikat hanya menerapkan sedikit kebijakan imigrasi, seperti *Chinese Exclusion Act*. Seiring berjalannya waktu, kelompok imigran yang berdatangan ke Amerika Serikat semakin banyak. Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat menetapkan berbagai kebijakan imigrasi yang baru.

Berbagai kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang baru mengakibatkan semakin sulitnya suatu kelompok masyarakat untuk masuk ke Amerika Serikat. Namun, dikarenakan alasan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, banyak kelompok imigran yang tetap bersikeras untuk memasuki Amerika Serikat meskipun tanpa melewati prosedur yang berlaku. Masuknya kelompok imigran tanpa melewati prosedur yang berlaku menjadi imigran tersebut sebagai imigran ilegal.

Pada tahun 2010 terdapat 11.2 juta imigran ilegal di Amerika Serikat (Pew Hispanic Center, Februari 2011). Selain mengambil pekerjaan dari pekerja Amerika, imigrasi ilegal menciptakan beban ekonomi yang sangat besar pada sistem perawatan kesehatan, sistem

pendidikan, sistem peradilan pidana, lingkungan, infrastruktur, dan keselamatan publik (Ting, 2011). Awalnya imigrasi dianggap bermanfaat bagi ketersediaan tenaga kerja, namun seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi, imigrasi dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi (Pradipta, Dharmiasih, Resen, 2016) .

Dibawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat menerapkan beberapa kebijakan menyangkut imigrasi untuk mengatasi imigran ilegal, diantaranya adalah menandatangani beberapa Perintah Eksekutif seperti *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States* yang berisi pelarangan masuknya imigran dari negara-negara yang dianggap sebagai sarang teroris seperti Irak, Iran, Suriah, Libya, Somalia, Yemen, dan Sudan. Juga ada *Border Security and Immigration Enforcement Improvements* yang berisi perintah untuk mendirikan tembok perbatasan di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang berada di selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskripsi. Dalam Moleong (2006), Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang-orang dalam bentuk kata-kata yang ditulis secara verbal dan perilaku yang dapat diamati. Studi kualitatif ini digunakan untuk memahami implikasi kebijakan imigrasi ilegal Amerika Serikat terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Penelitian ini akan memanfaatkan dan mengolah data yang berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel media, *website* resmi yang terkait dengan topik penelitian. Data yang digunakan umumnya

berasal dari *website* resmi *Trump White House*, *U.S Customs and Border Protection (CBP)*, *U.S Department of Homeland Security (DHS)*, *U.S Immigration and Customs Enforcement (ICE)*.

Penelitian ini akan mengolah berbagai data yang ada kemudian menggunakan teknik analisis data seperti yang dijelaskan oleh Wanto pada tahun 2017 mengenai metode analisis data kualitatif milik Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dilakukan melalui tiga langkah, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*. Pertama, data awal yang berasal dari berbagai sumber tentunya masih membahas secara luas sehingga perlu untuk diringkas. Selanjutnya data yang sudah diringkas akan disusun dalam pola hubungan untuk menginterpretasikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus diikuti untuk mencapai tujuan penelitian. Pada langkah terakhir akan dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Imigrasi Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara yang mempunyai sejarah imigrasi yang cukup panjang. Imigrasi telah memainkan peran penting dalam sejarah Amerika Serikat, dan Amerika Serikat terus memiliki kebijakan imigrasi paling terbuka di dunia. Sebelum era komunikasi dan transportasi yang cepat, Amerika Serikat mendorong imigrasi yang relatif terbuka untuk menempati tanah-tanah kosongnya. Seiring berjalannya waktu, Amerika Serikat mengalami berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh datangnya imigran dalam jumlah besar.

Pada masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat kemudian mengesahkan kebijakan-kebijakan imigrasi yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Kepentingan nasional yang dimaksud oleh Donald Trump yaitu yang sesuai dengan 4 poin yang tertuang dalam

strategi keamanan nasional Amerika Serikat yang baru yaitu, melindungi tanah air, mempromosikan kemakmuran Amerika, menjaga perdamaian melalui kekuatan dan mempromosikan pengaruh Amerika (US Embassy & Consulates in Indonesia, Desember 2017).

Kebijakan Imigrasi Ilegal Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump

Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Donald Trump, telah memberlakukan tingkat kebijakan imigrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tindakan penegakan imigrasi. Dalam empat tahun, Donald Trump menyelesaikan 472 tindakan eksekutif yang memengaruhi kebijakan imigrasi Amerika Serikat (Bolter, 2022).

Kebijakan imigrasi yang ditetapkan oleh Donald Trump berlandaskan nama Perintah Eksekutif. Beberapa Perintah Eksekutif Donald Trump yang berhubungan dengan imigrasi yang akan dibahas adalah Perintah Eksekutif 13767 yang berjudul *Border Security and Immigration Enforcement Improvement* (Meningkatkan Keamanan Perbatasan dan Menegakkan Peraturan Imigrasi), dan Perintah Eksekutif 13780 yang berjudul *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* (Melindungi Negara dari Masuknya Teroris Asing ke Amerika Serikat).

Meningkatkan Keamanan Perbatasan dan Menegakkan Peraturan Imigrasi

Meningkatkan Keamanan Perbatasan dan Menegakkan Peraturan Imigrasi adalah sebuah perintah eksekutif yang diterbitkan oleh presiden Donald Trump pada 25 Januari 2017. Perintah eksekutif ini mempunyai 17 bab yang tertuang di dalamnya. Setiap bab dalam perintah eksekutif ini memiliki baik makna, fungsi, kewajiban, ataupun wewenang yang

diberikan oleh Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kepada pihak-pihak yang terkait untuk memastikan pemerintah eksekutif ini dapat berjalan dengan sebaik mungkin.

Tujuan utama dari perintah eksekutif ini adalah penguatan perbatasan selatan Amerika Serikat yang sebelumnya kerap dimasuki secara ilegal oleh sekelompok masyarakat. Untuk memastikan tujuan ini dapat tercapai, Donald Trump melakukan pembangunan tembok perbatasan selatan dan memperkuat penjagaan di perbatasan dengan meningkatkan jumlah penjaga perbatasan, peningkatan jumlah fasilitas penahanan, dan penegakan prioritas yang memastikan bahwa seluruh sumber daya yang diperlukan akan digunakan untuk menjaga keamanan di perbatasan selatan.

Melindungi Negara dari Masuknya Teroris Asing ke Amerika Serikat

Melindungi Negara dari Masuknya Teroris Asing ke Amerika Serikat adalah sebuah perintah eksekutif yang diterbitkan oleh Presiden Donald Trump pada 27 Januari 2017. Perintah eksekutif yang sering disebut sebagai *Trump Travel ban* ini diterbitkan oleh Presiden Donald Trump dengan tujuan untuk memperketat keamanan Amerika Serikat terutama dari ancaman teroris yang dikhawatirkan berasal dari negara-negara Timur Tengah, yaitu Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, Irak dan Yemen.

Perintah eksekutif ini kemudian direvisi kembali oleh Donald Trump pada perintah eksekutif 13780 yang sebagian besar berisi sama dengan perintah eksekutif 13769 pada 6 Maret 2017 dengan tujuan untuk menghapuskan Irak dari negara yang terdampak *travel ban*. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Irak telah bekerja sama dengan Amerika Serikat sejak tahun 2003 dalam hal melawan militan

ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) (Holland, 2017).

Perintah eksekutif ini terdiri dari 11 bab dan setiap bab dalam perintah eksekutif ini memiliki baik makna, fungsi, kewajiban, ataupun wewenang yang diberikan oleh Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kepada pihak-pihak yang terkait untuk memastikan pemerintah eksekutif ini dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Donald Trump percaya bahwa ancaman terorisme dapat masuk ke dalam Amerika Serikat melalui imigran ilegal atau imigran ilegal berkemungkinan merupakan seorang teroris. Oleh karena itu perintah eksekutif ini juga merupakan kebijakan imigrasi ilegal yang menghalau datangnya imigran ilegal ke dalam Amerika Serikat.

Amerika Serikat sebelum masa pemerintahan Donald Trump, tepatnya pasca tragedi 9/11, mendeklarasikan *Global War on Terror* dan mengajak seluruh negara di dunia untuk memerangi masalah terorisme (Indraswari, Dharmiasih, Nugraha, 2017). Donald Trump pada masa pemerintahannya meningkatkan perlawanan terhadap ancaman terorisme pada tingkat yang lebih tinggi, yang mana hal ini dapat dilihat melalui perintah eksekutif 13780.

Implikasi Kebijakan Imigrasi Ilegal Donald Trump

Dua Kebijakan imigrasi ilegal Donald Trump yaitu Meningkatkan Keamanan Perbatasan dan Menegakkan Peraturan Imigrasi, dan Melindungi Negara dari Masuknya Teroris Asing ke Amerika Serikat mempunyai dampak terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan kepentingan nasional Amerika Serikat. Kebijakan imigrasi ilegal Meningkatkan Keamanan Perbatasan dan Menegakkan Peraturan Imigrasi atau penguatan penjagaan perbatasan selatan

Amerika Serikat berpengaruh terhadap munculnya kebijakan luar negeri *Migrant Protection Protocol (MPP)*, *Safe Third World Country*, dan keluarnya Amerika Serikat dari *Global Compact for Migration*.

Kebijakan luar negeri yang ditetapkan akibat dari kebijakan imigrasi ilegal penguatan perbatasan selatan Amerika Serikat adalah untuk memastikan bahwa kebijakan imigrasi ilegal tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin. *Migrant Protection Protocol* adalah kebijakan luar negeri antara Amerika Serikat dengan Meksiko yang didalamnya berisi kesepakatan bahwa Meksiko akan membantu mengamankan perbatasan selatan Amerika Serikat dari masuknya imigran ilegal menuju Amerika Serikat. *Migrant Protection Protocol* juga sering dikenal sebagai kebijakan *Remain in Mexico* (Upaningtyas, Putri dan Parameswari 2022)

Safe Third World Country adalah kebijakan luar negeri antara Amerika Serikat dengan tiga negara di Amerika Tengah, yaitu Guatemala, El Salvador, dan Honduras. Tiga negara di Amerika Tengah ini merupakan negara-negara penyumbang jumlah imigran ilegal dalam jumlah yang cukup masif kepada Amerika Serikat. Melalui *Safe Third World Country*, Amerika Serikat memastikan ketiga negara tersebut membantu mencegah imigran ilegal menuju Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri Donald Trump untuk keluar dari *Global Compact for Migration* telah membantu memastikan tujuan kebijakan imigrasi ilegalnya tercapai dikarenakan *Global Compact for Migration* adalah sebuah kesepakatan antara negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberi bantuan kepada kelompok imigran yang datang ke suatu negara. Kesepakatan ini menyangkut mengenai beberapa hal, seperti mendukung hak-hak pengungsi, melindungi

mereka, membantu mereka bermukim kembali, dan memastikan akses ke pendidikan dan pekerjaan (Wintour, 2017).

Kebijakan imigrasi ilegal Melindungi Negara dari Masuknya Teroris Asing ke Amerika Serikat atau penjagaan negara dari ancaman teroris berpengaruh terhadap munculnya kebijakan luar negeri pengadopsian *UN Security Council 2396*, penggunaan *Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System*, dan Operasi pemberantasan ISIS. *UN Security Council 2396* memastikan kerja sama antarnegara semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengisolasi pergerakan individu yang diduga sebagai teroris atau kriminal (Sales, 2021). Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diwajibkan untuk menggunakan data *passenger name record (PNR)* atau catatan nama penumpang, *advanced passenger information (API)* atau informasi lanjutan penumpang demi melindungi ruang publik dan wilayah sasaran empuk teroris Dengan adanya kerja sama antarnegara untuk mengisolasi pergerakan individu akan memudahkan kebijakan imigrasi ilegal Amerika Serikat terlaksana

Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System adalah sebuah sistem manajemen perbatasan yang digunakan untuk memindai atau menyaring setiap pelancong atau imigran yang hendak melewati perbatasan. Program ini dijalankan oleh 24 negara yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan lebih dari 300.000 pelancong di seluruh dunia dipindai oleh PISCES (Sales, 2021). Amerika Serikat percaya bahwa untuk mencegah masuknya pelancong kriminal atau teroris ke dalam Amerika Serikat diperlukan upaya untuk mengisolasi teroris dan mencegah mereka berpergian melewati batas negara.

Operasi pemberantasan ISIS merupakan kebijakan luar negeri yang muncul untuk

menjalankan kebijakan imigrasi ilegal penjagaan negara dari ancaman teroris. Selain mengisolasi pergerakan teroris untuk mencegah teroris memasuki wilayah Amerika Serikat, Donald Trump juga menetapkan strategi untuk membasmi teroris langsung di wilayahnya. Pada Maret 2019, Donald Trump telah mengambil alih Mosul di Irak dan Raqqa di Suriah dan telah membebaskan lebih dari 20.000 mil persegi wilayah dari kekuasaan ISIS (Trump White House, Maret 2019).

Operasi pengambilalihan dan pembebasan wilayah ISIS di Irak dan Suriah dilakukan oleh koalisi antara Amerika Serikat, Pasukan Keamanan Irak, dan mitra di Pasukan Demokratik Suriah. Dengan dilakukannya operasi pengambilalihan wilayah ISIS oleh koalisi ini, 60 target kelas atas, 100 pejabat ISIS, dan puluhan ribu pejuang ISIS telah dieliminasi (Trump White House, Maret 2019). Dengan berkurangnya personel ISIS dan juga wilayah kekuasaannya, ISIS sekarang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melancarkan serangan balasan terhadap Amerika Serikat.

Keterkaitan antara kebijakan luar negeri AS dan kepentingan nasional terlihat jelas dalam pernyataan di atas. Aspek kebijakan luar negeri Amerika, khususnya *America First*, telah membantu Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Donald Trump, mewujudkan empat rangkaian kepentingan nasional Amerika: melindungi tanah air, menjaga perdamaian melalui kekuatan, mempromosikan pengaruh Amerika dan mempromosikan kemakmuran Amerika. Keempat kepentingan nasional ini juga mempunyai kesamaan dengan kepentingan nasional menurut Nuechterlein, yaitu kepentingan pertahanan (melindungi tanah air), kepentingan ekonomi (mempromosikan kemakmuran Amerika), kepentingan tatanan dunia (menjaga perdamaian melalui kekuatan),

dan kepentingan ideologi (mempromosikan pengaruh Amerika).

Kebijakan imigrasi ilegal Meningkatkan Keamanan Perbatasan dan Menegakkan Peraturan Imigrasi merupakan perintah eksekutif yang berfokus pada kepentingan nasional pertahanan. Perintah eksekutif ini kemudian berimplikasi pada munculnya kebijakan luar negeri *Migrant Protection Protocol, Safe Third World Country*, dan keluarnya Amerika Serikat dari *Global Compact for Migration*. *Migrant Protection Protocol* berfokus pada kepentingan nasional pertahanan, *Safe Third World Country* berfokus pada kepentingan nasional pertahanan, dan keluarnya Amerika Serikat dari *Global Compact for Migration* berfokus pada kepentingan nasional pertahanan & ekonomi. Implikasi dari kebijakan luar negeri ini adalah turunnya angka tindak kriminal yang dilakukan oleh imigran ilegal di Amerika Serikat, dan meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan yang dapat diambil oleh penduduk asli Amerika Serikat dikarenakan menurunnya jumlah imigran ilegal yang masuk ke Amerika Serikat.

Kebijakan imigrasi ilegal Melindungi Negara dari Masuknya Teroris Asing ke Amerika Serikat merupakan perintah eksekutif yang berfokus pada kepentingan nasional pertahanan. Perintah eksekutif ini kemudian berimplikasi pada munculnya kebijakan luar negeri pengadopsian *UN Security Council 2396*, penggunaan *Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System*, operasi pemberantasan ISIS. Pengadopsian *UN Security Council 2396* berfokus pada kepentingan nasional pertahanan, penggunaan *Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System* berfokus pada kepentingan nasional pertahanan, operasi pemberantasan ISIS berfokus pada kepentingan nasional pertahanan, kepentingan nasional ideologi, dan

kepentingan nasional tatanan dunia. Implikasi dari kebijakan luar negeri ini adalah semakin sulit bagi teroris memasuki Amerika Serikat, meneguhkan dan menegaskan kepada dunia akan ideologi Amerika Serikat yang anti teroris, menjaga ketertiban dunia dari ancaman teroris.

PENUTUP

Penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan imigrasi ilegal Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump telah menciptakan Amerika Serikat yang lebih aman dan lebih sejahtera. Kebijakan imigrasi ilegal ini berpatokan pada politik luar negeri *America First*. Implikasi dari kebijakan imigrasi ilegal Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump adalah terciptanya kerja sama Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya untuk mencapai suksesnya kebijakan imigrasi ilegal.

Daftar Pustaka

- Bolter, J., Israel, E., & Pierce, S. (2022). Four years of profound change: Immigration policy during the Trump presidency. *Migration Policy Institute*.
- Golchin, A. (2015). The Most Common Reasons Why People Immigrate to US. <https://sandiegoimmigrationlawcenter.com/the-most-common-reasons-why-people-immigrate-to-us/>.
- Holland, S. (2017). EXCLUSIVE-Trump to leave Iraq off new travel ban order - White House source. <https://www.reuters.com/article/usa-immigration-idAFL3N1GJ2GO>.
- Passel, J.S. (2011). Unauthorized Immigrant Population: National and State Trends, 2010. <https://www.pewresearch.org/hispanic/2011/02/01/unauthorized-immigrant-population-brnational-and-state-trends-2010/>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2021
- PRADIPTA, I Gst. Ngr. Gede Agung; DHARMIASIH, D. A. Wiwik; RESEN, Putu Titah Kawitri. Peningkatan Elektabilitas Partai Golden Dawn dalam Pemilu Perlemen Yunani Tahun 2012 melalui Agenda Politik Anti-Imigrasi. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), [S.l.], v. 1, n. 1, jan. 2016. ISSN 2828-1853. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/17855>>. Date accessed: 16 July 2023.
- Sales, N. A. (2021). Counterterrorism in the Trump Administration and Beyond. <https://2017-2021.state.gov/counterterrorism-in-the-trump-administration-and-beyond/index.html>
- Trump White House (2019). The United States and Our Global Partners Have Liberated All ISIS-Controlled Territory. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/united-states-global-partners-liberated-isis-controlled-territory/>
- Ting, J. C. (2011) Downsides of High Immigration. <https://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/10/16/fewer-babies-for-better-or-worse/downsides-of-high-immigration>
- UPANINGTYAS, Putu Ditha Tilottami; PUTRI, Penny Kurnia; PARAMESWARI, A.A.A Intan. ANALISIS KEBIJAKAN MIGRANT PROTECTION PROTOCOL (MPP) PADA ERA DONALD TRUMP TAHUN 2019. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), [S.l.], v. 2, n. 1, p. 104-117, may 2022. ISSN 2828-1853. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/86284>>. Date accessed: 16 July 2023.
- US Embassy & Consulates in Indonesia (2017). President Donald J. Trump Announces a National Security Strategy to Advance America's Interests. <https://id.usembassy.gov/president-donald-j-trump-announces-national-security-strategy-advance-americas-interests/#:~:text=and%20national%20security,-,III,it%20remains%20second%20to%20none>.

- Wanto, A. H. (2017). Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39-43.
- Wintour, P. (2017). Donald Trump pulls US out of UN global compact on migration. <https://www.theguardian.com/world/2017/dec/03/donald-trump-pulls-us-out-of-un-global-compact-on-migration>.